

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERIZINAN USAHA BONGKAR MUAT BARANG PADA ANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008

OLEH
MUHAMMAD AGUS FELLANI
NPM : 07 840 0349
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembahasan skripsi ini mengenai Perizinan Usaha Bongkar Muat Barang Pada Angkutan Laut Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008.

Sedangkan permasalahan yang diajukan adalah Apa yang menjadi permasalahan dalam pengurusan izin bongkar muat barang angkutan laut di Pelabuhan (Persero) Cabang 1 Belawan dan Usaha-usaha apa yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam pengurusan izin usaha bongkar muat barang di Pelabuhan (Persero) Cabang 1 Belawan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research).

Hasil penelitian menjelaskan tentang tumpang tindihnya jenis izin yang berbeda-beda yang dikelola diberbagai tingkatan pemerintahan dan bahkan oleh asosiasi-asosiasi usaha, telah menyebabkan terjadinya pengaturan yang berlebihan (over regulation). Terlepas dari sekian banyaknya regulasi yang mengatur sektor swasta, fungsi sesungguhnya dari izin usaha yaitu perlindungan sosial, control pasar dan pengumpulan informasi belum benar-benar dirumuskan dan dilaksanakan secara jelas oleh Pemerintah. Adapun yang menjadi masalah di dalam pengurusan izin bongkar muat barang pada angkutan laut adalah lamanya waktu pengurusan dan adanya kutipan-kutipan di luar retribusi yang telah ditetapkan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam pengurusan izin usaha bongkar muat barang di Pelabuhan adalah dengan melakukan pelayanan secara terpadu, efisien dan efektif.